

**EVALUASI KINERJA HUTAN KEMASYARAKATAN GAPOKTAN ALAM
LESTARI RESORT JANGKOK KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
RINJANI BARAT**

***PERFORMANCE EVALUATION OF COMMUNITY FOREST GAPOKTAN ALAM
LESTARI RESORT JANGKOK WEST RINJANI FOREST MANAGEMENT UNIT***

Siti Munawarah Ananda^{1*}, Budhy Setiawan², Niechi Valentino³

Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
stmunawarah11@gmail.com

Abstrak

Provinsi NTB berkomitmen mewujudkan implementasi pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer 9 tahun 2021 yang menyebutkan bahwa perlu adanya peningkatan aktivitas ekonomi penduduk yang berada di sekitar hutan melalui skema perhutanan sosial. Pola pengelolaan lahan perhutanan sosial di NTB pada skema perhutanan sosial lebih banyak pada pembentukan HKm.. Skema hutan kemasyarakatan lebih banyak diminati masyarakat NTB dikarenakan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada dan untuk perizinannya bisa dilakukan di hutan lindung dan produksi. Berdasarkan permasalahan diatas, perlu adanya penelitian yang berkaitan dengan evaluasi pengelolaan HKm Gapoktan Alam Lestari. Mengingat bahwa pengelola HKm wajib melakukan monitoring secara berkala selama 1 kali dalam 5 tahun yang diatur dalam Perdirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No.P.9/PSKL/PKPS/KUM.1/10/2019. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif. Dalam penentuan responden menggunakan metode snowball sampling. Didapatkan hasil evaluasi hutan kemasyarakatan sebesar 75% dengan keterangan kategori penilaian Sedang.

Kata kunci : perhutanan sosial, hutan kemasyarakatan, evaluasi

Abstract

NTB Province is committed to realizing the implementation of the Minister of Environment and Forestry Regulation Number 9 of 2021 which states that there is a need to increase the economic activities of residents living around the forest through social forestry schemes. The pattern of social forestry land management in NTB on social forestry schemes is more on the establishment of community forests. Community forestry schemes are of more interest to the people of NTB due to their aim to improve the welfare of existing communities and for licensing can be done in protected and production forests. Based on the above problems, it is necessary to conduct research related to the evaluation of HKm management of Gapoktan Alam Lestari. Given that HKm managers are required to carry out periodic monitoring once every 5 years which is regulated in Perdirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No.P.9/PSKL/PKPS/KUM.1/10/2019. The method used in this research is descriptive method. In determining respondents using the snowball sampling method. The results of the community forest evaluation were 75% with a description of the Medium assessment category.

Keywords : social forestry, community forest, evaluation

PENDAHULUAN

Keberadaan lahan adalah aspek penting sebagai penyangga aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, peningkatan lahan kritis selalu saja terjadi karena persoalan kerusakan lahan dan hutan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020) menjelaskan bahwa luas lahan kritis yang berada di Provinsi NTB menyentuh angka 522.776 Ha. Berdasarkan kondisi diatas provinsi NTB berkomitmen mewujudkan NTB asri dan lestari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (2018). Salah satu wujud dari komitmen Provinsi NTB tersebut dapat dilihat melalui dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berlandaskan pada isu global yaitu isu perubahan iklim. Isu

perubahan iklim harus menasar pada peningkatan ekonomi hijau dan kualitas tutupan lahan di wilayah tertentu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2015) menyebutkan bahwa aktivitas perubahan iklim di dunia makin meningkat sebanyak 50% dibandingkan tahun 1990. Hal ini terjadi karena pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim yang berkepanjangan.

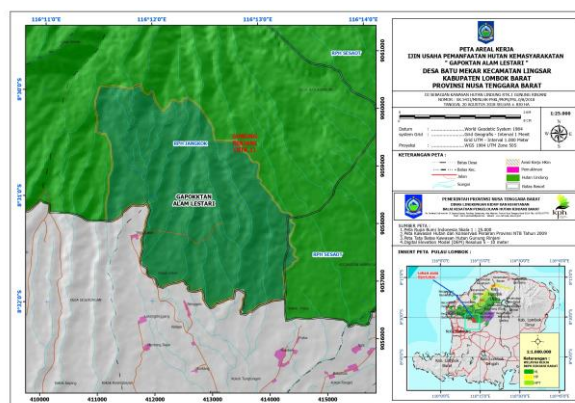
Selain itu, praktik nyata yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan NTB asri dan lestari melalui Total realisasi belanja APBD terbesar dalam kuruh waktu 3 tahun ini dialihkan guna mensupport kegiatan Perlindungan Sumber Daya Alam serta Ekosistem sebesar 47,17%, dan diikuti kegiatan Rehabilitasi, Kerjasama, dan Perhutanan Sosial sebesar 32,79%, program Pemanfaatan Potensi sumber Daya Hutan sebesar 14,57%, serta program Pengelolaan Hutan sebesar 5,45% (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).

Selanjutnya, Provinsi NTB juga berkomitmen mewujudkan implementasi pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer 9 tahun 2021 yang menyebutkan bahwa perlu adanya peningkatan aktivitas ekonomi penduduk yang berada di sekitar hutan melalui skema perhutanan sosial. Di Provinsi NTB, program HKm pertama kali dilaksanakan pada tahun 1994/1995 di Pulau Sumbawa dan tahun 1996/1997 di Pulau Lombok. Masyarakat di sekitar areal HKm, khususnya para petani peserta program hutan kemasyarakatan, telah merasakan manfaat sosial ekonomi dari pelaksanaan program tersebut (Fauzi & Hafiza, 2021). Berdasarkan permasalahan diatas, perlu adanya penelitian yang berkaitan dengan evaluasi pengelolaan HKm Gapoktan Alam Lestari. Mengingat bahwa pengelola HKm wajib melakukan monitoring secara berkala selama 1 kali dalam 5 tahun yang diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan No.P.9/PSKL/PKPS/KUM.1/10/2019 tentang Pedoman Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Perhutanan Sosial.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei – Juni 2023, bertempat di HKm Gapoktan Alam Lestari, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Areal Kerja Gapoktan Alam Lestari

Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu ATK, Kamera dan Laptop. Selanjutnya bahan yang diperlukan adalah peta kawasan, dokumen RKU, RKT, AD/ART yang diterima

dari gapoktan dan kuisioner. Dalam Abdullah (2018) menjelaskan metode penelitian deskriptif yaitu penjelasan yang digunakan untuk mendapatkan berita tentang status atau gejala yang terkait dengan populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini menggabungkan hasil pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menyatukan informasi berupa angka-angka dan narasi. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data kualitatif dan kuantitatif dan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan obeservasi, wawancara dan pemeriksaan dokumen.

Variable penelitian

Tabel 1. Variabel Penelitian

No	Aspek	Kriteria
1	Ekonomi	a. Tata Kelola Tata Kelola Sumber Daya Hutan b. Tata Kelola Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan c. Usaha Ekonomi Hasil Hutan
2	Ekologi	a. Fungsi Kawasan Hutan b. Keanekaragaman Jenis c. Perbaikan Hidrologis d. Perlindungan Hutan
3	Sosial	a. Kesejahteraan Masyarakat b. Penguatan Kelembagaan c. Perubahan Perilaku d. Penanganan konflik e. Keterlibatan Gender f. Kontribusi Pengelolaan

Sumber : Modifikasi PERDIRJEN No. P.9/PSKL /PKPS/ KUM .1/10/2019

Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan prosedur, observasi, wawancara, dan pemeriksaan dokumen untuk memperoleh data. Metode observasi adalah cara untuk mengumpulkan informasi dengan melakukan penilaian lapangan terhadap kondisi biofisik dan tata kelola (Sudarsono, 2016) . Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai batasan dan kondisi HKm Gapoktan Alam Lestari. Selanjutnya metode wawancara, bertujuan untuk mendapatkan data informasi untuk memperoleh keterangan dengan tanya jawab dan metode pemeriksaan dokumen dilakukan untuk membantu penilaian bobot skoring.

Penentuan Responden

Penentuan responden pada penelitian ini menggunakan *snowball sampling*. *Snowball sampling* merupakan pengambilan sampel kecil kemudian membesar sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Ibarat bola salju yang menggelinding makin lama, makin besar (Fauzy, 2019). Jumlah responden yang didapatkan sebanyak 22 dari pengurus dan anggota Gapoktan Alam Lestari.

Analisis Data

Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.9/PSKL/PKPS/KUM.1/10/2019 tentang Pedoman Pembinaan, Pengendalian, dan

Evaluasi Perhutanan Sosial digunakan untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan, yang kemudian dimodifikasi dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Daftar pertanyaan berbentuk kuesioner digunakan dan informasi yang terkumpul akan dihitung dan diolah untuk mendapatkan hasil evaluasi berdasarkan sistem skoring. Persentase penilaian dihitung dengan rumus berikut:

$$\frac{\text{Hasil Penilaian}}{\text{Nilai Tertinggi}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Baik : 81-100%
2. Sedang : 60-80 %
3. Tidak baik : < 60%

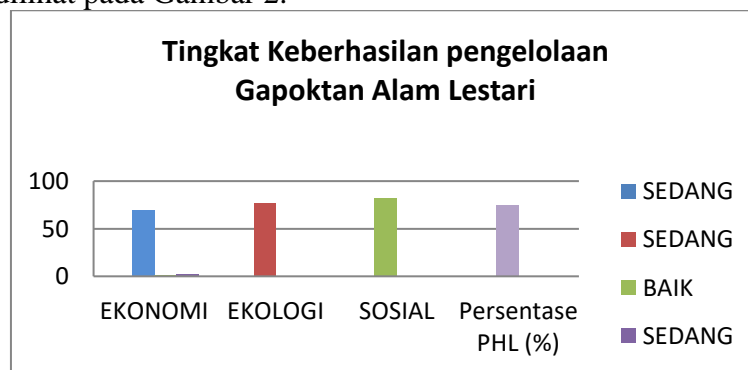
HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Keberhasilan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Keberadaan HKm bertujuan guna meningkatkan kemampuan dalam mengelola serta mendapatkan hasil hutan terbaik, dengan tujuan menaikkan perekonomian penduduk setempat. Pemerintah memiliki program yang dikenal melalui skema perhutanan sosial, yang dimana masyarakat diberikan akses pengelolaan hutan baik di dalam maupun di sekitar kawasan hutan, perizinan ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu penurunan angka kemiskinan (Murti, 2019).

Berdasarkan hasil keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomer SK.5431/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2018 tanggal 20 Agustus 2018, penetapan areal HKm Gapoktan Alam Lestari seluas ±830 ha pada kawasan hutan lindung yang memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada gabungan kelompok tani hutan (GAPOKTAN) sebagai kegiatan pemanfaatan kawasan.

Kesuksesan dalam mengelola hutan, merupakan indikator dari upaya dalam penilaian hutan berkelanjutan. Tingkat keberhasilan pengelolaan Gapoktan Alam Lestari dapat dilihat pada Gambar 2.



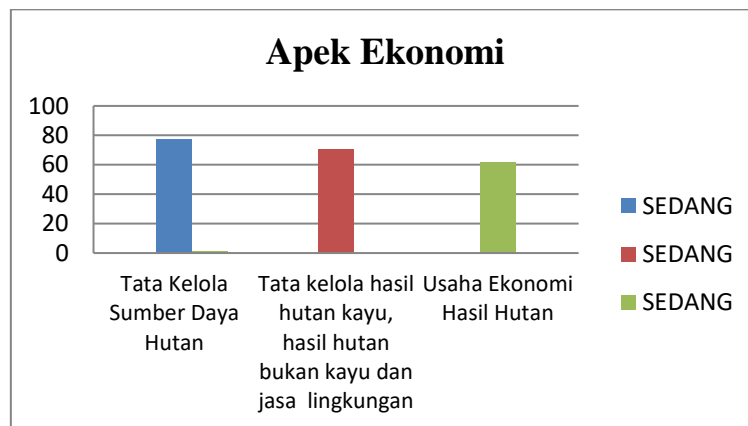
Gambar 2. Grafik Penilaian Tingkat Keberhasilan Pengelolaan Gapoktan Alam Lestari

Gambar 2. menunjukkan aspek ekonomi (tata kelola sumber daya hutan, tata kelola HHK, HHBK dan jasa lingkungan serta usaha ekonomi hasil hutan) dikategorikan sedang (70%). Selain itu, pada aspek ekologi (fungsi kawasan hutan, keanekaragaman jenis, perbaikan hidrologis dan perlindungan hutan) dikategorikan sedang (77%). Selanjutnya untuk aspek sosial (kesejahteraan masyarakat, penguatan kelembagaan, perubahan perilaku, penanganan konflik, keterlibatan gender dan kontribusi pengelola) dikategori baik (82%). Mengacu pada 3 aspek pengelolaan hutan

lestari, maka tingkat keberhasilan dikategorikan sedang (78%). Secara detail tingkat keberhasilan Gapoktan Alam Lestari dijelaskan di bawah ini.

1. Aspek Ekonomi

Dalam penilaian aspek ekonomi yang mengacu pada PERDIRJEN No. P.9/PSKL /PKPS/ KUM .1/10/2019 secara dengan kriteria tata kelola sumber daya hutan, tata kelola hasil hutan kayu, hutan bukan kayu dan jasa lingkungan dan usaha ekonomi hasil hutan memiliki keterlibatan dalam pengelolaan keberhasilan program HKM. Dapat dilihat secara rinci aspek ekonomi pada Gambar 3.



Gambar 3. Grafik Penilaian Aspek Ekonomi

a. Tata Kelola Sumberdaya Hutan

Parameter tata kelola sumber daya hutan terdapat penilaian tanda batas areal kerja yang dimana ditandai dengan pal batas untuk mengetahui batasan antara kawasan hutan kemasyarakatan dengan kebun masyarakat. Sedangkan untuk batas areal garapan petani ditandai dengan beberapa tanda seperti kembang emas, puring, pohon gamal dan pagar. Rusadi *et al.* (2021) dalam kajiannya mengemukakan dengan mempertimbangkan kedekatan lahan dengan tanaman masyarakat, kegiatan penataan areal kerja bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menentukan batas, luas, dan lokasi areal kelola..

Dalam pengelolaan HKM tidak luput dari adanya peralihan hak kelola kerja kepada pihak lain atau dengan kata lain ganti rugi lahan. Selain itu juga, harta turunan orang tua merupakan salah satu faktor terjadinya peralihan hak izin. Penggunaan teknologi ramah lingkungan diaplikasikan dengan penggunaan pupuk organik dari kotoran ternak sapi. pengaplikasian pupuk organik meningkatkan kualitas tanah, terutama pada tahap awal penerapan agroforestri (Mulyana *et al.*, 2017).

Pada indikator relasi penanaman memperoleh persentase 61 % sampai dengan 80 % dari hasil wawancara, sedangkan hasil lapangan berbeda. Pembagian bibit yang tidak merata juga menjadikan salah satu relasi penanaman berbeda dengan RKU, contohnya seperti relasi penanaman porang, lengkuas dan kopi sambung. Pada indikator laporan tahunan pemegang izin hutan ke pejabat terkait dibuat oleh masing-masing ketua sub KTH dalam penyusunan laporan tahunan PNBK yang diserahkan ke bendahara Gapoktan.

b. Tata Kelola Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan

Parameter tata usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan terdapat 3 indikator penilaian. Indikator pertama yaitu realisasi kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK). Dimana masyarakat dilarang menebang pohon di kawasan

hutan lindung, menurut Undang Undang Nomer 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00, sehingga pemungutan hasil hutan kayu tidak dapat dilakukan.

Pada indikator relisasi kegiatan pemakaian hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan dari hasil wawancara menyatakan sebesar 61% sampai 80% , hal ini bertolak belakang dengan dokumen RKU. Ada beberapa tanaman yang tidak terelasi sesuai dengan dokumen RKU seperti tanaman porang, lengkuas dan kopi. Hal ini disebabkan karena pembagian bibit yang masih belum merata. Adapun hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan seperti manggis (*Garcinia mangostana* L), durian (*Durio zibethinus* L), rambutan (*Nephelium lappaceum* L), kakao (*Theobroma cacao* L), aren (*arenga pinnata* Merr), langsung (*Lansium domesticum* L), alpukat (*persea americana* Mill), kemiri (*Aleurites moluccanus* (L) Willd), porang (*amorphophallus muelleri* Blume) dan talas (*colocasia esculenta* (L) Schoot). Sedangkan untuk jasa lingkungan, Gapoktan Alam Lestari mempunyai ekowisata berupa air terjun Timponan. Wisatawan yang berkunjung ke air terjun Timponan tidak hanya merasakan sensasi berenang. Selain itu, bisa merasakan sensasi tracking dan penjelajahan ke dalam hutan yang lebat (Fathurrahman *et al.* 2022).

Pada indikator ketiga komitmen pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dipenuhi setiap tahun. Pemungutan pajak diselenggarakan mulai januari - juni. Pembayaran pajak dihitung berdasarkan komoditi yang ditanam. Untuk memudahkan pembayaran, pengurus inti menetapkan pembayaran PNBP Rp. 2.000/are/tahun. Pembayaran dipungut oleh masing-masing ketua sub KTH dan diserahkan langsung ke bendahara Gapoktan. PNBP dipungut berdasarkan hasil yang diperoleh dari pohon-pohon produktif di dalam lahan garapannya.

c. Usaha Ekonomi Hasil Hutan

Pada kriteria usaha ekonomi dan hasil hutan terdapat 8 indikator penilaian. Pada indikator pertama yaitu unit usaha perhutanan sosial yang sudah berjalan, di Gapoktan Alam lestari terdapat 5 kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang sudah berjalan. Diantaranya KUPS Akar Leluhur memproduksi umbi porang dan talas, KUPS *Argepure Adventure* mengelola wisata air terjun Timponan, KUPS Buana Kopi memproduksi biji kopi cherry, KUPS Gula Madu memproduksi gula aren batok dan gula aren cair dan KUPS Mandala Buah mengelola buah manggis, durian dan rambutan. Berdasarkan Perdirjen Perhutanan Sosial dan kemitraan Kehutanan Nomor: P.2/SPKL/SET/KUM.1/5/2018 KUPS digambarkan sebagai sebuah inisiatif untuk memperkuat kapasitas lembaga usaha dalam melakukan kegiatan pengembangan usaha di bidang perhutanan sosial.

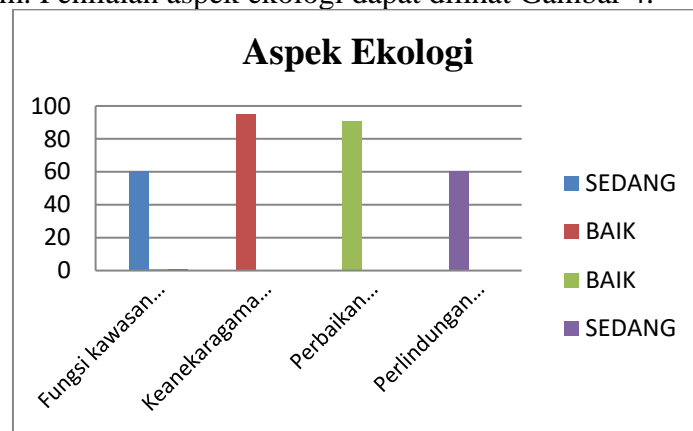
Pada indikator kedua sumber daya menjalankan usaha perhutanan sosial yang berkaitan dengan modal, aset dan kemitraan. Beberapa KUPS memperoleh bantuan alat ekonomi dan kerjasama dari berbagai donator sebagai aset yang dimanfaatkan secara bersama oleh anggota kelompok. Adapun bentuk kerjasama KUPS Akar leluhur dengan PT. Silitiga pada tahun 2019 sampai 2021 dalam jual beli porang dan KUPS *Argepure Adventure* dengan Lombok *Rafting* dalam mengelola air terjun Timponan.

Bantuan alat yang diberikan diharapkan memudahkan dalam mengelola hasil hutan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Pada indikator ketiga tentang perencanaan usaha dan laporan perkembangan, dimiliki semua KUPS kecuali KUPS *Argepure Adventure*

dikarenakan sudah lama vakum akibat pandemi covid 19. Pada indikator pengelolaan sistem informasi manajemen pemasaran para petani memasarkan secara tradisional langsung ke pengepul atau pasar dengan akses pasar pemasaran produk masih sebatas kabupaten/lokal. Pada kawasan hutan kemasyarakatan Gapoktan Alam Lestari ditemukan tempat rekreasi yaitu air terjun. Air Terjun Timponan resmi dibuka sejak tahun 2020 dengan harga tiket Rp. 5.000/ orang. Akan tetapi, semenjak pandemi jumlah kunjungan berkurang, hal ini dikarenakan kawasan wisata tutup dan masih dalam proses perbaikan sarana prasarana jalan menuju lokasi air terjun. Sedangkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan karbon masih dalam tahap mencari investor.

2. Aspek Ekologi

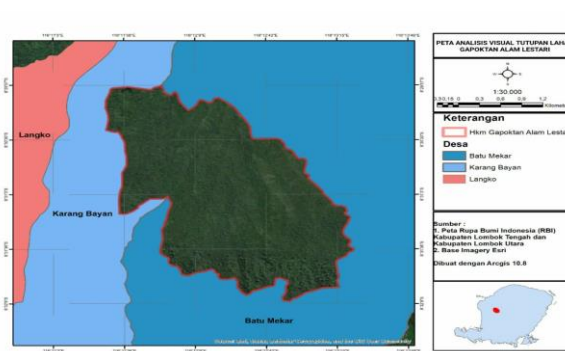
Hutan membagikan manfaat bagi kesenambungan hidup. Baik sebagai fungsi sosial, ekonomi dan ekologi. Fungsi ekologi hutan berhubungan dengan kedudukan hutan sebagai ekosistem. Penilaian aspek ekologi dapat dilihat Gambar 4.



Gambar 4. Grafik Penilaian Ekologi

a. Fungsi Kawasan Hutan

Areal kerja perizinan HKm Gapoktan Alam lestari seluas 830 Ha di kawasan hutan lindung. Berdasarkan analisis visual dari citra *Google Earth Pro* versi 71.8 pada gambar 5



Gambar 5. Analisis Visual Tutupan Lahan Gapoktan Alam Lestari

Luasan tutupan HKm Gapoktan Alam Lestari menunjukkan sebesar persentase 80%. Selain itu berdasarkan *groundcheck* di lapangan juga menunjukkan bahwa kondisi tutupan lahan masih terjaga, yang ditunjukkan dengan masih didominasi oleh tanaman pokok kehutanan seperti mahoni (*Swietenia mahagoni* Jacq), merak (*caesalpinia pulcherrima*), bajur (*Pterospermum javanicum* Jungh), dao (*Dracotomelon dao*(Blanco) Merr & Rolfe) dan terep (*Artocarpus odaratisissimus* Blanco).

Dalam konteks budidaya tanaman pada HKm menggunakan sistem tanam agroforestri, Surnayanti *et al.* (2022) menjelaskan bahwa sistem agroforestri penting dilakukan karena memiliki peran untuk memperbaiki kondisi ekologi suatu lahan dengan menggabungkan antara tanaman kehutanan dengan tanaman pangan. Adapun tanaman yang ditemui lapangan dan budidayakan oleh para petani seperti manggis (*Garcinia mangostana* L), durian (*Durio zibethinus* L), rambutan (*Nephelium lappaceum* L), kakao (*Theobroma cacao* L), aren (*Arenga pinnata* Merr), langsung (*Lansium domesticum* L), alpukat (*Persea americana* Mill), kemiri (*Aleurites moluccanus* (L) Willd), porang (*Amorphophallus muelleri* Blume) dan talas (*Colocasia esculenta* (L) Schoot).

b. Keanekaragaman Jenis

Keanekaragaman jenis tanaman yang berada di kawasan hutan lindung di areal KPH Rinbar terus bertambah, terutama pada areal perizinan HKm Gapoktan Alam Lestari. Hal ini sejalan dengan pandangan Safei *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa jumlah jenis tumbuhan berbanding lurus dengan keanekaragaman jenis. Hal ini dibuktikan dari kegiatan aktivitas kelompok tani hutan Gapoktan Alam Lestari yang melakukan budidaya porang, talas, valini dan kopi. Selain itu, terlepas dari aktivitas budidaya kelompok tani hutan, keberadaan vegetasi alami pada kawasan areal perizinan yang dikelola kelompok tani hutan tersebut, masih terjaga dengan baik secara kualitas pertumbuhan tegakan. Jenis-jenis endemik yang ditemuikn di lapangan adalah bajur (*Pterospermum javanicum* Jungh), dao (*Dracotomelon dao* (Blanco) Merr & Rolfe) dan terep (*Artocarpus odoratissimus* Blanco). Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Latifah *et al.* (2021) menyebutkan bahwa dao dan bajur merupakan jenis asli flora malesiana yang salah satu penyebarannya berada di kepulauan sunda kecil, khususnya Provinsi NTB. Sejalan dengan Aliya *et al.* (2022) menyebutkan bahwa terep atau dalam bahasa sunda bendo, dapat ditemukan di hutan hujan tropis, baik dataran rendah hingga ketinggian 1.500 mdpl. Persebaran bendo meliputi kawasan Sumatra, Kalimantan, Jawa hingga Kepulauan Nusa Tenggara.

c. Perbaikan Hidrologis

Sarah *et al.* (2015) menyebutkan bahwa pemanfaatan air yang bersumber langsung pada hutan menunjukkan bahwa tata guna hidrologi dalam konteks ekonomi masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat memanfaatkan secara langsung air terjun Timponan dengan membangun bak penampungan air dan menyalurkannya ke rumah-rumah. Akan tetapi dalam konteks mutu air di Desa Batu Mekar masih terjaga secara kualitas dan kuantitas, karena pemanfaatannya hanya dilakukan oleh masyarakat tersebut dengan tetap memperhatikan kelestarian hutan di sekitar DAS Jangkok. Praktek yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Batu Mekar, sejalan dengan pandangan Sulistyorini *et al.* (2017) bahwa kualitas dan jumlah air yang tersedia berkorelasi langsung dengan kesehatan hutan, dengan kata lain kualitas air merupakan indikasi yang baik bagi kesehatan hutan. Selain itu, ketersediaan air yang bersih merupakan bagian dari tolak ukur yang harus dilaksanakan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

d. Perlindungan Hutan

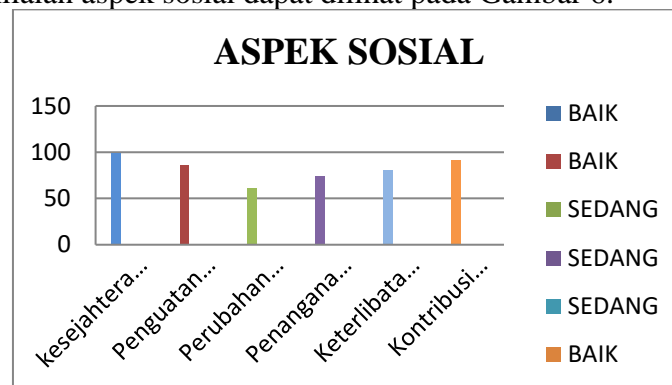
Perlindungan terhadap hutan dilakukan guna melestarikan dan menjaga kelangsungan jangka panjang sumber daya hutan yang ada. (Yahya & Idris, 2019). Pada indikator unit pengamanan hutan, aktivitas patroli hanya dilaukan oleh pihak Resort Jangkok, tetapi tidak dilaksanakan secara rutin. Padahal patroli hutan merupakan

indikator yang harus dipenuhi dalam mendukung perhutanan sosial yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan tidak ditemukan kegiatan penanganan pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan penanganan hama penyakit di Gapoktan Alam Lestari. Praktek perlindungan hutan di Gapoktan Alam Lestari tidak tertuang dalam aturan internal pengelolaan HKm, hal ini dapat dibuktikan dari tidak adanya *standar operasional prosedur* (SOP) terkait perlindungan hutan, sehingga menjadi kewajaran jika serangan hama penyakit di tanaman pokok durian mengalami kegagalan, belum ada tindak lanjut dari kelompok tani ataupun dari pihak KPH hingga saat ini.

3. Aspek Sosial

Adapun parameter aspek sosial kesejahteraan masyarakat, penguatan kelembagaan, perubahan perilaku, penanganan konflik, keterlibatan gender dan kontribusi pengelolaan. Penilaian aspek sosial dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Grafik Hasil Penilaian Sosial

a. Kesejahteraan Masyarakat

Kemunculan program HKm diperlukan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Jumanto & Martono (2020) menjelaskan Program Perhutanan Sosial memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Perekonomian masyarakat setempat, terutama setelah mendapat SK hak pengelolaan, meningkatkan nilai aset kayu kehutan dan aset tanah. Selain itu, menanam tanaman komersial atau menggunakan kawasan hutan untuk pariwisata adalah dua cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatan.

Selanjutnya, penerapan tenaga kerja meningkat. Pola penerapan yang melibatkan masyarakat secara langsung dapat membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga dengan memperkerjakan orang (Mayrowani & Ashari, 2016). Praktek- praktek peningkatan lapangan kerja yang tersedia dan mampu meningkatkan ekonomi rumah tangga adalah menjadi pembersih gulma, penanaman porang dan talas pada alahan garapan.

Penguatan Kelembagaan

Kelembagaan memainkan peran penting dalam keberhasilan pembangunan dan bisa dikatakan bahwa pembangunan gagal karena kelembagaan yang lemah, seperti praktek kelembagaan pada sektor sumber daya alam (Pertanian, Perikanan dan Kelautan serta Kehutanan). Selain itu Horotoa *et al.* (2018) menambahkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari dari peran kelembagaan.

Dalam praktek kelembagaan Gapoktan Alam Lestari, menunjukkan sudah memiliki izin hak kelola HKm yang berakta notaris dan disahkan pada 6 Februari 2019.

Pemegang hak kelola hutan memiliki peraturan dan mekanisme yang disepakati bersama yang diatur melalui AD/ART Gapoktan Alam Lestari berazaskan mandiri, keswadaya dan kegontong royongan. Selain itu untuk mengikat sesama anggota kelompok tani hutan diberlakukan “awiq-awiq” terdapat di masing-masing kartu tanda penggarap. Selain itu, kartu tanda penggarap merupakan bukti bahwa masing-masing penggarap termasuk kedalam Gapoktan Alam Lestari yang diakui secara sah dan berhak mendapatkan izin kelola HKm.

Selain itu, kegiatan pertemuan rutin dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan. Berdasarkan hasil wawancara, para anggota Gapoktan Alam Lestari melakukan pertemuan rutin dalam rangka mempererat tali silaturahmi sekaligus membahas terkait dengan PNBK yang diwakili masing-masing ketua sub kelompok. Akan tetapi, dalam konteks peningkatan kapasitas kelompok tani hutan, Gapoktan Alam Lestari jarang mengadakan kegiatan pelatihan bahkan hampir tidak ada kegiatan pelatihan loka karya dan sebagainya. Selain itu, petani penggarap jarang mengikuti pelatihan dikarenakan mereka lebih baik ke ladang untuk mencari hasil hutan. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat, pelatihan yang pernah dilaksanakan adalah pelatihan sambung kopi dan penanaman porang..

Untuk keberadaan aset, Gapoktan alam lestari memiliki jumlah aset tetap. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara pengurus kelompok membeli tanah untuk dibangun koperasi sebagai tempat pertemuan anggota Gapoktan Alam Lestari sebagai penambahan aset yang dimiliki Gapoktan tersebut. Untuk saat ini, pengurus menyewa bangunan sebagai lokasi sementara koperasi tersebut. Selain itu, untuk penambahan aset tetap dari segi tanaman, didukung dengan penambahan bibit porang dan vanili ke penggarap.

Dalam mendukung keberlanjutan Gapoktan Alam lestari, upaya yang telah dilakukan dengan membentuk koperasi simpan pinjam yang diberi nama koperasi Jangkok Lestari. Anggota koperasi berasal dari anggota Gapoktan Alam Lestari dan sebagian dari pegawai Resort Jangkok. Berdasarkan kesepakatan anggota koperasi menetapkan iuran sebesar RP. 250.0000 untuk menjadi anggota awal dan iuran tetap Rp.30.000/bulan/anggota dan sudah berjalan 2 tahun. Akan tetapi masih banyak anggota Gapoktan Alam lestari yang belum menjadi anggota koperasi dikarenakan trauma dengan koperasi *bodong* sebelum dibentuknya koperasi ini.

b. Perubahan Perilaku Pengurus

Pada kriteria perubahan perilaku pengurus memiliki 2 indikator. Indikator pertama yaitu munculnya tokoh kader baru yang dimana pada kepengurusan ini memiliki pengurus baru. Hal ini didukung dengan bertambahnya kelompok tani hutan (KTH) yang dimana awal perizinan berjumlah 14 dan sekarang berjumlah 16 KTH.

Selain itu, dalam praktek hak izin kelola HKm terdapat mekanisme secara tidak tertulis bahwasanya jika ada anggota yang terdaftar sebagai penggarap HKm meninggal dunia maka diwariskan anaknya. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara terkait dengan perubahan perilaku masyarakat dari eksploitatif menjadi membangun hutan, dengan adanya skema hutan kemasyarakatan, para penggarap menjaga hutan. Sejalan dengan Sejalan dengan Haryani & Rijanta (2019) sebelum perizinan HKm masyarakat mengelola hutan hanya melihat fungsi produksi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Namun, setelah perizinan diberikan, masyarakat mempertimbangkan fungsi hutan dan keberlanjutannya.

c. Penanganan Konflik

Pengelolaan hutan memiliki banyak pihak yang berkepentingan, baik individu maupun kelompok yang dapat menimbulkan konflik. Setelah ditetapkan sebagai kawasan HKm, masyarakat masih percaya bahwa tanah yang digarap dimiliki secara turun temurun oleh keluarga. Akibatnya, beberapa masyarakat tidak membayar pajak karena mereka percaya bahwa tanah itu milik individu dan bukan negara.

Selain itu, pemasalahan dalam ganti rugi lahan pernah terjadi sesama anggota KTH, yang dimana jual beli lahan diperuntukan sesama anggota KTH. Peraturan tentang penanganan konflik untuk areal hutan terdapat aturan berupa awiq-awiq, peraturan lokal mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat (Huzaini *et al.* 2023), sedangkan penanganan konflik yang lain diselesaikan dalam bentuk sosialisasi dan musyawarah sesama anggota.

d. Keterlibatan Gender

Laki-laki dan perempuan mengelola hutan bersama sama dengan tujuan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Keduanya secara bersama-sama dapat memanfaatkan sumber daya hutan. Jumlah anggota Gapoktan Alam Lestari terdiri dari 1.342 kepala keluarga (KK) yang diantaranya 70 % laki-laki dan 30 % perempuan yang terdiri dari 16 sub kelompok tani hutan (KTH).

Langkah untuk meningkatkan kesetaraan gender adalah partisipasi setiap perempuan dalam pembangunan. Pengelolaan hutan, yang dulunya dikuasai oleh pria, telah berubah. Wanita bahkan menjabat sebagai menteri kehutanan, menunjukkan kemampuan perempuan dalam manajemen hutan. Pencapaian wanita di berbagai bidang menunjukkan bahwa peran mereka dalam kemajuan sebanding dengan laki-laki. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah contoh nyata kesuksesan perempuan dalam industri kain tenun ikat sebagai pewarna alami yang berkembang di Kabupaten Sumba, Nusa Tenggara Timur (Raudhah *et al.*, 2021).

Perempuan menghabiskan waktu untuk kegiatan dalam rumah tangga. Namun dalam pengelolaan hutan, keterlibatan perempuan pada pengelolaan lebih aktif dari laki-laki. Perempuan lebih sering dijadikan buruh dalam pengelolaan hutan, seperti membersihkan gulma, menanam porang dan memanen hasil hutan bukan kayu sekaligus mengelolanya. Upah yang diberikan untuk membersihkan gulma sebesar Rp. 50.000/hari.

e. Kontribusi Pengelola

Dalam kegiatan Gapoktan Alam lestari memberikan pembagian dana yang disumbangkan ke desa sebesar 5% dai hasil KUPS Argepure Adventure yang mengelola air terjun Timponan. Akan tetapi, dikarenakan pandemi Covid dari tahun 2020 hingga sekarang wisata air terjun Timponan belum berjalan secara optimal, sehingga 3 tahun terakhir ini pihak Gapoktan Alam Lestari belum memberikan sumbangan ke Desa. Gapoktan Alam Lestari memiliki hubungan sangat baik dengan Resort jangkok, dimana pihak resort jangkok memberikan sosialisasi dan penyuluhan serta pengadaan pelatihan guna meningkatkan sumber daya untuk mengelola hutan. Sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer 9 Tahun 2021 bahwa hutan kemasyarakatan ditunjukan untuk memberdayakan masyarakat sehingga hasilnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukan hasil evaluasi kinerja HKm Gapoktan Alam Lestari dikategorikan sedang (75%), dengan aspek ekonomi dikategori sedang (70%) Selain itu, pada aspek ekologi dikategorikan sedang (77%). Selanjutnya untuk aspek sosial dikategori baik (82%).

Saran

Perlu adanya keterlibatan seluruh anggota Gapoktan Alam Lestari dalam membangun pengelolaan HKm. Dari aspek ekonomi perlu dilakukan penelitian terkait dengan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) terkait dengan strategi pemasaran produk KUPS. Selanjutnya, dari aspek ekologi perlu dilakukan inventarisasi tanaman endemik di kawasan areal perizinan Gapoktan Alam Lestari. Selain itu juga perlu dilakukan penelitian lanjutan pada bidang silvikultur jenis, terutama dalam hal peningkatan produktivitas hasil tegakan berdasarkan kombinasi tegakan yang dipadukan dengan nutrisi hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliya, M., Nurmilawati, M., & Primandiri, P. R. (2022). *Karakteristik Morfologi Bendo (Artocarpus elasticus Reinw.) di Kabupaten Kediri*. 517–522.
- Dr. H. Abdullah K., M. P. (2018). *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen*. Gunadarma Ilmu.
- Fathurrahman, Muhammad Abdul Haris Ramadan, Sofia Ichsan uladi, Apriling Diah, M. P. N. (2022). Pembinaan dan Penataan Kawasan Wisata Alam Batu mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Abdi Isnaini*, 9(2), 681–689.
- Fauzi M, H. N. (2021). Studi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan(HKm) Di Desa Senggi Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Silva Samalas*, 4(1), 12–19. <https://scholar.archive.org/work/putapzfo2rcqfok47y7d2mqu4m/access/wayback/https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jss/article/download/3943/2670>
- Fauzy, A. (2019). Metode Sampling. In *Molecules* (Vol. 9, Issue 1). <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/83/65%0Ahttp://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L603546864%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1155/2015/420723%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76>
- Fiktor Theodorus Horota, Bambang Nugroho, & Jonni Marwa. (2020). KELEMBAGAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL: STUDI KASUS KABUPATEN MANOKWARI. *JURNAL KEHUTANAN PAPUASIA*, 4(2), 100–113. <https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasia.vol4.iss2.99>
- Haryani, R., & Rijanta, R. (2019). Ketergantungan Masyarakat Terhadap Hutan Lindung Dalam Program Hutan Kemasyarakatan. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 2(2), 15. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v2i2.70>
- Huzaini, M., Jufri, A., & Arkandia, L. D. (2023). Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Dilihat dari Perspektif Islam di Kawasan Hutan Sesaot Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Imiah Ekonomi Islam*, 9(01), 493–499. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Kehutanan, D. L. H. dan. (2020). *Data lahan kritis Provinsi NTB*. <https://data.ntbprov.go.id/dataset/data-lahan-kritis-provinsi-ntb>
- Kehutanan, D. L. H. dan. (2022). *Mewujudkan NTB Sebagai Provinsi Hijau Melalui Peningkatan Kualitas Tutupan Lahan*.

- <https://dislhk.ntbprov.go.id/2022/02/18/mewujudkan-ntb-sebagai-provinsi-hijau-melalui-peningkatan-kualitas-tutupan-lahan/>
- Latifah, S., Valentino, N., Permata Sari, D., & Sari, B. S. A. (2021). Species Composition, and Diversity of Mataram University Green Open Space, West Nusa Tenggara. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 891(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/891/1/012026>
- Martono, J. & D. . (2020). Impact of Social Forestry Program Forest Partnership Scheme on Forest Sustainability and Forest Farmer Income. *Gontor AGROTECH Science Journal*, 6(3), 579. <https://doi.org/10.21111/agrotech.v6i3.4908>
- Mayrowani, H., & Ashari, N. (2016). Pengembangan Agroforestry untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Petani Sekitar Hutan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 29(2), 83. <https://doi.org/10.21082/fae.v29n2.2011.83-98>
- Murti, H. A. (2019). Perhutanan Sosial Bagi Akses Keadilan Masyarakat Dan Pengurangan Kemiskinan. *Jurnal Analis Kebijakan*, 2(2), 62–75. <https://doi.org/10.37145/jak.v2i2.29>
- NTBPROV. (2018). *VISI: “Mewujudkan Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang.”* <https://www.ntbprov.go.id/profil-pimpinan>
- PPS/Bappenas, K. (2015). *Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya.* <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-13/>
- Raudhah, Hafizianor, & Asyisyifa. (2021). Analisis Gender Dalam Pengelolaan Hutan kemasyarakatan di Desa Ambungan dan Desa Ujung Batu Kecamatan Pelaihari. *Jurnal Sylva Scientiae*, 04(5), 831–841.
- Rusadi, Nusrah, Syamsu Alam, S. (2021). *Pengembangan Skema Hutan Kemasyarakatan Di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan (Development of Community Forest Scheme in Kindang District of Bulukumba Regency of South Sulawesi Province).* 15, 80–100.
- Safei, R., Kaskoyo, H., Darmawan, A., & Haikal, F. F. (2021). Keanekaragaman Jenis Pohon Sebagai Satu Indikator Kesehatan Hutan Lindung (Studi Kasus di Kawasan Hutan Lindung yang Dikelola oleh HKm Beringin Jaya). *Jurnal Belantara*, 4(1), 89–97. <https://doi.org/10.29303/jbl.v4i1.601>
- Sarah, S., Umar, S., & Alam, A. S. (2015). Nilai Ekonomi Manfaat Hidrologis Hutan Di Sub Das Sombe Untuk Kebutuhan Konsumsi Air Rumah Tangga Di Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga Kota Palu. *Jurnal Warta Rimba*, 3(2), 31–38. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/WartaRimba/article/view/6347>
- Sudarsono, Dwi SH., S. . (2016). *Panduan Monitoring & Evaluasi PHBM.* Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara Barat (SAMATA).
- Sulistiyorini, I. S., Edwin, M., & Arung, A. S. (2017). Analisis Kualitas Air Pada Sumber Mata Air Di Kecamatan Karang dan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Hutan Tropis*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.20527/jht.v4i1.2883>
- Surnayanti, S., Indriyanto, I., Asmarahman, C., Damayanti, I., Tsani, M. K., Riniarti, M., Duryat, D., Santoso, T., & Bintoro, A. (2022). Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah Pada Desa Hanura Untuk Budidaya Tanaman MPTS Pala (*Myristica fragrans*). *Repong Damar: Jurnal Pengabdian Kehutanan Dan Lingkungan*, 1(2), 115. <https://doi.org/10.23960/rdj.v1i2.6433>
- Yahya, T., & Idris, I. (2019). Perlindungan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pelestarian Alam Di Taman Nasional Berbak Provinsi Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(2), 206–213. <https://doi.org/10.22437/jssh.v3i2.8422>